

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan pajak penghasilan YouTuber secara umum dan di KPP Pratama Metro, hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan *YouTuber* di KPP Pratama Metro, dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan *YouTuber* di KPP Pratama Metro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Berdasarkan penelitian ini, untuk menghitung pajak yang terutang atas penghasilan *YouTuber* dari *YouTube* dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar, maka dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang diatur dalam PER-17/PJ/2015. Akan tetapi, *YouTuber* dapat dikategorikan ke dalam beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mengakibatkan perbedaan besarnya pajak yang terutang sehingga berdampak pada penerimaan negara. Selain itu hal ini juga berdampak pada penggalan potensi dan pemantauan kewajiban perpajakan *YouTuber*. Beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberikan kepastian terkait KLU *YouTuber*, pemanfaatan teknologi untuk penggalan potensi dan pemantauan, dan melakukan sosialisasi terkait perpajakan *YouTuber*. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk menambah penerimaan negara atas pajak penghasilan dari penghasilan yang diperoleh *YouTuber* dari *YouTube*.

Kata kunci: *YouTuber*, *YouTube*, KLU, NPPN

Abstract

This study aims to determine the provisions for imposing YouTuber income tax in general and at KPP Pratama Metro, obstacles in imposing YouTuber income tax at KPP Pratama Metro, and efforts to overcome the barriers in imposing YouTuber income tax at KPP Pratama Metro. The research method used in this study is qualitative with data collection methods through interviews and literature studies. Based on this research, to calculate the tax payable on a YouTuber's income from YouTube with a gross turnover of less than 4.8 billion, it can use the Net Income Calculation Norm as regulated in PER-17/PJ/2015. However, YouTubers can be categorized into several Classifications of Business Fields, resulting in differences in the amount of tax payable that impacts state revenue. In addition, this also affects exploring the potential and monitoring of YouTubers' tax obligations. Several efforts to overcome these obstacles include providing certainty regarding YouTuber KLU, utilizing technology for possible exploration and monitoring, and conducting socialization related to YouTuber taxation. This effort aims to increase state revenue for income tax from income earned by YouTubers from YouTube.

Keywords: YouTuber, YouTube, KLU, NPPN